



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
OLEH KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

OLEH:

RICKY PRAYOGA
NIM : 11675102890



PROGRAM S.1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
OLEH KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Pada Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:

RICKY PRAYOGA
NIM : 11675102890



**PROGRAM S.1
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2020**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

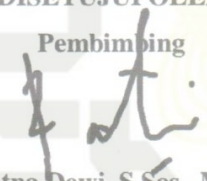
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : RICKY PRAYOGA
 NIM : 11675102890
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
 BARANG MILIK DAERAH OLEH KANTOR
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH PROVINSI RIAU

DISETUJUI OLEH

Pembimbing


Ratna Dewi, S.Sos., M.Si
 NIP. 19690419 200701 1 025

MENGETAHUI

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Jurusan
 Administrasi Negara




Dr. Drs. H. Mub. Said HM, M.Ag, MM
 NIP. 19620512 198903 1 003


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
 NIP. 19790101200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RICKY PRAYOGA
 NIM : 11675102890
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN
 BARANG MILIK DAERAH OLEH KANTOR
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH PROVINSI RIAU

DISETUJUI OLEH

Ketua Penguji



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag,MM
NIP. 19620512 198903 1 003

MENGETAHUI

Penguji I



Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji II



Devi Deswimar, S.Sos., M.Si
NIK. 103 411 027



ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH (BMD) OLEH KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

Oleh:

RICKY PRAYOGA
NIM. 11675102890

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penghapusan barang milik daerah serta mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diperoleh hasil bahwa Analisis Pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Kendala utama yang menjadi penghambat adalah ketidaklengkapan dokumen serta ketidakjelasan fisik barang yang diusulkan untuk dihapuskan, Hal tersebut disebabkan karena beberapa proses yaitu proses pemindahtanganan dimasalalu yang tidak disertai dokumen administrasi yang tidak lengkap, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam memahami teknis penghapusan, serta seringnya terjadi perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kata Kunci : analisis, pelaksanaan penghapusan, kantor BPKAD Provinsi Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Robbil'alamin, puji syukur kehadiran ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH OLEH KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU”**. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun. Namun banyak pihak yang mendorong dan memberikan motivasi bagi penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penyusun mengucapkan terimakasih kepada yth :

1. Kedua Orang Tua Ibunda tercinta Rasunah S.Pd dan Ayahanda Bapak (Alm) Amir, selalu membimbing dan memberikan semangat, dengan penuh pengorbanan baik secara moril maupun materil, serta selalu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mendoakan ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag.M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr.Drs.H. Muh. Said, HM.M.Ag.MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos, M.Si. selaku ketua jurusan administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Jhon Afrizal Shi, MA selaku sekretaris jurusan administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibuk Ratna Dewi S.Sos, M.Si, selaku dosen konsultasi dan dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan nasehat saran dan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
7. Mhd. Rafi, S.Sos., M.Sc selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada peneliti.
8. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kepada Bapak/Ibu Staff dan Pegawai Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Bapak Syahril Abdi, AP., M.Si, Bapak Drs. Muhammad Arifin, M.Si, Bapak Tengku Riga Brimayuda, S.Stp., M.Si, Sumarlin S. Sos, Ibuk Sinta SE. yang telah banyak membantu penulis.

10. Kepada Perpustakaan Uin Suska Riau beserta dengan jajaranya yang telah membantu berbagai Referensi yang penulis butuhkan.

11. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaanya, terdapat kelemahan dan kekurangan baik dari segi tulisan maupun referensi, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dalam rangka penyempurnaan penulisan.

Semoga semua motivasi, semangat, do'a serta bantuan yang telah diberikan mendapatkan imbalan dari ALLAH SWT. Penulis berharap semoga karya tulis ini dapat bermanfaat, dan terkhusus untuk penulis sendiri. *Amin amin yarobal alamin.*

Pekanbaru, November 2020
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

RICKY PRAYOGA
NIM. 11675102890



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pemerintah Daerah	17
2.2 Kebijakan Publik.....	18
2.2.1 Pengertian kebijakan	18
2.2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan.....	24
2.2.3 Aktor-aktor Yang Berperan Dalam Proses Kebijakan.....	26
2.2.4 Aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan	28
2.2.5 Proses pembuatan kebijakan	30
2.3 Aset Daerah/Barang Milik Daerah.....	32
2.4 Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah.....	34
2.4.1 Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah	37
2.4.2 Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah.....	37
2.4.3 Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.....	38
2.4.4 Dasar Penghapusan	41
2.5 Kewenangan Penghapusan Barang Milik Daerah.....	41
2.6 Proses Penghapusan Barang Milik Daerah	42
2.6.1 Instrumen Hukum Penghapusan	44
2.7 Harta (Aset) dalam pandangan Islam.....	46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Penelitian Terdahulu	49
2.9 Defenisi Konsep	53
2.10 Konsep Oprasional	53
2.11 Kerangka Pemikiran	54

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	56
3.2 Jenis Penelitian	56
3.3 Sumber Data	56
3.4 Informan Penelitian	57
3.5 Metode Pengumpulan Data	58
3.6 Analis Data	59

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Sejarah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	59
4.2 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	62
4.2.1 Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	62
4.2.2 Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	62
4.3 Bagan Struktur Organisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau	63

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisi Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau	85
5.2 Kendala dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang milik daerah	110



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	112
6.2 Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Nama Aset Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Riau	7
Tabel 1.2	Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau Dari Daftar Barag Pengguna Berupa Peralatan Kantor Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau	9
Tabel 1.3	Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau Dari Daftar Barang Pengguna Berupa Peralatan Mesin Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau	11
Tabel 2.1	Konsep Oprasional	54
Table 3.1	key Informan	58
Tabel 5.1	Distribusi Infromen Berdasarkan Umur Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.....	91
Tabel 5.2	Distribusi Informen Berdasarkan Lama Bekerja Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.....	92
Tabel 5.3	Distribusi Informen Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Kator Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	93



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	55
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hulu	78
Gambar 4.4	Bagan Struktur Organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.....	84
Gambar 5.1	Siklus penghapusan barang milik daerah karena pemindahtanganan pada Kantor Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.....	88
Gambar 5.2	Siklus penghapusan barang milik daerah karena putusan pengadilan pada Kantor Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 2019	94
Gambar 5.3	Siklus penghapusan barang milik daerah karena ketentuan perundang-undangan pada Kantor Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 2019	98
Gambar 5.4	Siklus penghapusan barang milik daerah karena pemusnahan pada Kantor Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 2019	101
Gambar 5.5	Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau Dari Daftar Barang Pengguna Berupa Kartu Inventaris Barang (KIB) Peralatan dan Mesin Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	104
Gambar 5.5	Surat Penghapusan Barang Milik Daerah pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	104



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Otonomi Daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksana pembangunan secara keseluruhan dimana masing- masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing- masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasi pelaksanaan otonomi daerah ini terdapat dalam Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni salah satunya asas desentralisasi yaitu Pemerintah Pusat menyerahkan Sebagian urusan Pemerintahan kepada Pemerintah Daerah. salah satu dampak dari desentralisasi adalah adanya perubahan dalam pembagian alokasi keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. perubahan pembagian alokasi keuangan dilaksanakan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah ini diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah. dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan suatu paradigma baru mengenai pengelolaan aset daerah, yang memuat tentang bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas serta meningkatkan nilai tambah dalam pengelolaan aset daerah. wujud nyata keseriusan pemerintahan dalam menangani aset daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dituangkan dalam Peraturan Pemerintrah No. 27 Tahun 2014 di perdalam lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dalam Proses Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah ini harus dibuat rencana kerja yang matang, serta adanya suatu mekanisme kerja yang baik antara pegawai dengan atasan agar tercapainya tujuan dari organisasi yang bersangkutan. Demikian juga halnya dalam Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah ini dibutuhkan suatu tata kerja yang baik sehingga tanpa adanya kerjasama serta partisipasi dari seluruh pegawai, maka target telah ditentukan akan tercapainya suatu tujuan dengan maksimal.

Untuk mencapai suatu tujuan pelaksanaan penghapusan diperlukan pengetahuan yang matang bagi SDM untuk menjalankan prosedur penghapusan, hal ini didasari dengan penghapusan berupa barang tidak bergerak di karenakan rusak berat, terkena bencana, Tidak dapat digunakan secara optimal, Terkena teknologi (perencanaan pembangunan) kota, Kebutuhan organisasi, Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi. dan juga didasari dengan penghapusan berupa barang Bergerak (Pertimbangan Teknis) Secara fisisk tidak dapat digunakan, Akibat mordinisasi, Telah melampaui batas waktu, Megalami perubahan dasar spesifikasi, Selisih kurang akibat penggunaan/susut. (Pertimbangan Ekonomi) Jumlah berlebih, Secara ekonomis lebih untung apabila dihapus. (Karena Hilang) Kesalahan kelalaian bendaharawan barang/pemegang barang, Mati bagi tanaman/hewan ternak, karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure).

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewenangan penghapusan, Untuk barang tidak bergerak seperti Tanah dan/ atau bangunan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Barang milik daerah sudah bisa diproses penghapusannya apabila kepala daerah membentuk panitia penghapusan barang milik daerah setelah itu Panitia penghapusan Barang Milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait. Panitia penghapus meneliti barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu selanjutnya dituang dalam berita acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain. Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada kepala daerah. Mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan berita acara hasil hasil penelitian Panitia Penghapusan.

Pelaksanaan Penghapusan mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan SK Pengelolaan Kepala Daerah, menetapkan cara penghapusan : lelang dan/atau disumbangkan /dihibahkan atau dimusnahkan. Apabila lelang terbatas, kepala daerah membentuk panitia pelelangan terbatas.

Pelaksanaan penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang (Mutasi). penghapusan barang milik daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada pada daftar barang daerah. Penghapusan tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan kepala daerah dan penetapan oleh Pengelola atas nama kepala daerah.

Penghapusan barang daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang dimaksud tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtanggankan. Alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan. pelaksanaan penghapusan khusus penghapusan gedung milik daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusan nya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu keputusan kepala daerah.

Alasan penghapusan khusus Rusak Berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut yaitu rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti: gempa bumi, banjir angin topan, kebakaran dan yang sejenis.

Menurut Permendagri No.19 Tahun 2016 Bab II tentang Ruang Lingkup Pasal 2, Ruang Lingkup Pengelolaan Aset Daerah/Barang Milik Daerah meliputi, Perabot pengelola barang milik daerah, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Pengelolaan barang milik daerah pada SKPD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; n) Barang milik daerah berupa rumah o) ganti rugi dan sanksi.

Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terperinci yang didasarkan pada pertimbangan, perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (Keuangan Negara).

Aset daerah dapat dikategorikan menjadi dua bagian yakni sebagai berikut:

1. Aset tidak bergerak (*Real property*) yang meliputi tanah, bangunan gedung, air, jalan dan jembatan, jaringan dan serta bangunan bersejarah.
2. Aset bergerak (*Personal property*) yang meliputi mesin, kendaraan, peralatan (meliputi alat berat, alat angkat, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, alat laboratorium dan alat keamanan.

Sementara itu, pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004:178) adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi, nilai komersial atau nilai tukar yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Menurut Peraturan daerah provinsi riau Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwasannya Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi : Pejabat pengelola barang milik daerah, Perencanaa kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, pengawasan dan pengendalian, Pengelolaan barang milik daerah pada pengelolaan BLUD, Barang Milik Daerah Berupa Negara, dan Ganti Rugi Sanksi. Proses tersebut merupakan Siklus Logistik yang lebih rinci pengelolaan barang milik daerah yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus pembendaharaan.

Provinsi Riau mempunyai Aset daerah yang merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah provinsi Riau untuk dapat mengelola aset secara memadai. Dalam pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Aset provinsi Riau juga harus dijaga, dikelola, diamankan dan dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, selain sebagai amanah yang harus bertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai *stake-holder*, Aset daerah juga merupakan sumber potensial penerimaan daerah serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus pandai dalam mengelola aset atau barang milik daerah dan dituntut untuk membenahi sistem

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan aset daerah dengan berpedoman pada regulasi dan Undang-undang yang berlaku, berikut daftar aset daerah :

Tabel 1.1: Daftar Nama Aset Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Riau

No	Nama Aset Daerah	Keterangan
1.	Tanah	-
2.	Peralatan dan Mesin	Alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian dan peternakan, alat kantor dan rumah tangga, alat studio dan komunikasi, alat ukur, alat kedokteran, alat laboratorium, dan alat keamanan.
3.	Gedung dan Bangunan	Terali Kantor
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, dan Jaringan
5.	Aset Tetap Lainnya	Buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/ kebudayaan, dan hewan ternak serta tumbuhan.
6.	Konstruksi dan Pengkerjaan	Aset daerah yang sedang dalam proses pembangunan pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruh

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tahun 2020

Terlihat dari tabel 1.1 diatas dan Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari kantor BPKAD Provinsi Riau, Aset Daerah Provinsi Riau sangat banyak, hal ini terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, Jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta Kontruksi dan pekerjaan. Aset-aset yang banyak ini memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Aset daerah yang memiliki kondisi barang yang tidak layak digunakan seperti Barang Tidak Bergerak dikarenakan ; a. Rusak berat, terkena bencana, b. Tidak dapat digunakan secara optimal c. Terkena planologi (perencanaan pembangunan) kota d. Kebutuhan organisasi e. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi. Barang Bergerak Pertimbangan Teknis ; a. Secara fisisk tidak dapat digunakan b. Akibat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mordinisasi c. Telah melampaui batas waktu d. Megalami perubahan dasar spesifikasi e. Selisih kuerang akibat penggunaan/susut. Pertimbangan Ekonomi ; a. Jumlah berlebih b. Secara ekonomis lebih untung apabila dihapus. Karena Hilang ; a. Kesalahan kelalaian bendaharawan barang/pemegang barang b. Mati bagi tanaman/hewan ternak c. karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure) d. sudah bisa dilakukan Penghapusan untuk kondisi barang tertentu, hal ini bertujuan untuk mencegah barang yang semakin lama semakin, Jumlah berlebih e. Secara ekonomis lebih untung apabila dihapus dan kualitas pemakaiannya sehinga apabila di hapuskan dari daftar pengguna barang Pemerintah Daerah tidak mengeluarkan biaya perawatan yang berlebihan.

Namun berdasarkan Observasi dan informasi yang penulis dapat dari Kantor BPKAD Provinsi Riau ternyata diantara aset-aset yang banyak tersebut dengan tahun yang sudah masuk kategori sudah bisa dihapuskan, akan tetapi masih belum dihapuskan/dibiarkan. Masing-masing aset yang terdata di BPKAD provinsi Riau semuanya memiliki kondisi dan tahun perolehan yang berbeda-beda, hal ini terlihat dari tabel 1.2 berikut.

UIN SUSKA RIAU

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.2 : Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau Dari Daftar Barang Pengguna Berupa Peralatan Kantor Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau

No.	Nama barang	Tahun perolehan	Jumlah	Harga Satuan	Spesifikasi/ Lokasi	Kondisi Barang
1.	Camera	-	1	-	Sony/dsc-w380	Hilang
2.	Dispenser	2009	3	2,719,515.00	Sanken/Panas Netral Dingin HWD-730TC	Rusak berat
3.	Komputer PC Unit	2015	1	10,850,000.00	Lenovo C20-30 / MP09Z4FJ	Hilang
4.	Komputer PC Unit	2015	1	10,850,000.00	Lenovo C20-30 / MP09Z56H	Hilang
5.	Komputer PC Unit	2015	1	10,850,000.00	Lenovo C20-30 / MP09Z5BR	Hilang
6.	Personal komputer (Komputer LCD)	2010	2	9,985,325.00	Compaq W185q/Intel Pentium Dual-Core E 6500	Rusak Berat
7.	Printer	2009	1	6,500,000.00	Epson/Dot Metrik/LQ2180	Hilang
8.	Printer	2010	1	3,671,821.44	Canon LPB3150 Printer laser Jet	Hilang
9.	Printer	2011	1	6,007,000.00	Epson/Dot Matrik/ LQ2190	Rusak berat
10.	Printer	2011	1	5,957,000.00	Epson/Dot Matrik/ LQ2180	Rusak berat
11.	UPS	2011	1	1,654,750.00	Lexus 650A	Rusak berat
12.	UPS	2012	2	826,881.00	Prolin PR0700V/ Line Interavtive	Rusak berat
13.	UPS	2014	4	1,458,734.00	ICE CE 1200	Rusak berat
14.	Gorden	2010	1	77,988,530.00	Roman SHARE, Vertical Blind/ONA-RS 204DX	Rusak berat
15.	Gorden	2011	1	28,085,000.00	Roman Shade	Rusak berat
16.	Laptop	2009	3	16,636,800.00	Acer Aspire/12jat 10 / 2930-581G32Mn	Hilang

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tahun 2020

Hak cipta

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari tabel 1.2 diatas seharusnya beberapa barang/aset yang sudah mengalami perubahan fisik seharusnya sudah bisa di lakukan penghapusan dengan pertimbangan tertentu, Namun berdasarkan Observasi dari Data yang penulis dapat dari BPKAD Provinsi Riau ternyata masih banyak barang barang yang seharusnya dihapuskan tetapi masih tetap di biarkan. Berdasarkan penemuan-penemuan dilapangan ternyata BPKAD Provinsi Riau belum melaksanakan penghapusan barang milik daerah dari tahun 2015 sejak BPKAD berdiri sampai 2019 dan terjadi pelaksanaan penghapusan pada januari 2020, Hal tersebut disebabkan karena beberapa proses yaitu proses pemindahtanganan dimasa lalu yang tidak disertai dokumen administrasi yang tidak lengkap, kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam memahami teknis penghapusan, serta seringnya terjadi perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). hal ini juga dikarenakan ketidak kemampuan pegawai dalam mengidentifikasi barang milik daerah sehinga barang milik daerah masih terdata di Kartu Inventarisasi Barang (KIB).

Selanjutnya ada beberapa barang yang mengalami perubahan spesifikasi dalam perolehanya, hal ini terlihat dari tabel berikut ini.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3 : Daftar Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau Dari Daftar Barang Pengguna Berupa Peralatan Mesin Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau

No.	Nama barang	Tahun perolehan	Jum Blah	Harga Satuan	Spesifikasi/ Bpkb	Kondisi Barang
1.	Station wagon/new x-trail 2.0 m/t		1	-	L-08762867	Rusak berat
2.	Sepeda motor/kawasaki/K LX 150 BF	2015	1	36,000,000.00	L-10870028D	Rusak berat
3.	Minibus/Nissan Grandlivina 1.5 1.5 SV (4X2) MT	-	1	-	-	Rusak berat
4.	Pickup/Toyota Hilux Doubele cabin	2011	1	-	320,350,000.00	Rusak Berat
5.	Pickup/ Ford Ranger Single	-	1	-	-	Rusak Berat
6.	Minibus/toyota avanza velos 1.5 m/t	-	1	-	-	Rusak Berat
7.	Pickup Double cabin/Toyota Hilux 2.5 G 4X4	-	1	-	-	Rusak Berat
8.	Microbus/Toyota Hiacie Commuter MT	2015	1	-	-	Rusak Berat

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tahun 2020

Berdasarkan data diatas peneliti mencoba merangkum beberapa gejala dengan kegiatan penghapusan Barang Milik Daerah, Dari data diatas terlihat jelas bahwa hal yang menjadi fokus permasalahan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau masih banyak terlihat barang milik daerah yang tidak memiliki kode spesifikasi barang sehingga sulit untuk dilaksanakan proses penghapusan dan juga aset-aset yang ada pada BPKAD Provinsi Riau banyak mengalami kerusakan dan belum dihapuskan sehingga pihak kantor sendiri ada yang membeli peralatan pribadi untuk menunjang kinerja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka. pengadaan barangpun semakin berkurang di karenakan barang-barang yang lama belum terealisasikan penghapusannya. Dalam hal ini juga terlihat belum adanya transparansi mengenai perolehan Barang Daerah, Sehingga nilai aset yang sebenarnya sulit diketahui oleh masyarakat umum. Selain permasalahan tersebut juga terdapat belum akuratnya informasi mengenai pelaporan aset daerah, dalam hal ini data yang *diinput* atau data yang dimasukkan belum menggambarkan kondisi ril barang yang ada, hanya sebagian kecil yang bisa diketahui Bagaimana keadaan Aset tersebut, seperti dapat kita lihat dari tabel diatas yang mana kondisi barang yang ada serta keterangan tahun perolehan, harga satuan, spesifikasi/lokasi tidak lengkap sehingga menyulitkan tim pengelola barang untuk menghapuskan barang tersebut.

Provinsi Riau dituntut tidak hanya dapat merngoptiomalkan pengelolaan keuangan saja , tetapi juga harus memaksimalkan Pelaksanaan Penghapusan Aset Daerah *finising*. Namun penghapusan Aset Daerah bukan merupakan perkara yang mudah, selama ini penghapusan aset daerah kurang diperhatikan dengan baik, sehingga penghapusan aset daerah belum bisa berjalan optimal. Oleh sebab itu Pemerintah daerah Provinsi Riau harus dapat mengoptimalkan pelaksanaan penghapusan Aset Daerah sehingga dapat menambah pengadaan barang pada tahun yang akan datang.

Dari fenomena diatas peneliti melihat gejala- gejala lain yang berhubungan dengan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah antara lain :

1. Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau masih Terdapat aset-aset daerah yang tidak memiliki data kode barang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kode reg, tahun Perolehan, harga satuan, nilai perolehan, nilai scrap, spesifikasi/lokasi sehingga sulit untuk dilakukan penghapusan.

Masih ada dokumen Administrasi aset tersebut yang tidak memiliki kelengkapan.

Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di kantor BPKAD Provinsi Riau dalam memahami teknis Penghapusan Barang Milik Daerah. Serta kurang serius dalam mengadakan Proses Penghapusan.

Aset daerah di pandang sebelah mata oleh Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

Pada Kantor BPKAD Provinsi Riau Belum pernah melakukan penghapusan dengan semua cara.

Adanya pemindahtanganan dimasalalu yang disertai dokumen administrasi yang tidak lengkap. serta seringnya terjadi perpindahan sumber daya manusia (SDM).

Berdasarkan temuan-temuan latar belakang di atas yang diuraikan serta gejala- gejala yang ditemukan peneliti dilapangan, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian mendalam dengan judul: ***“ANALISIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH OLEH KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU***

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penghapusan barang milik daerah oleh kantor Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah oleh Kantor Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan yang diuraikan maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Memperkaya dan mempertajam khasanah bagi perkembangan kepustakaan ilmu sosial terutama jurusan Administrasi Negara.
2. Diharapkan penelitian ini berguna sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan berpikir serta melihat sejauh mana pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada Kantor Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini nantinya, penulisan akan membagi menjadi enam Bab bahasan, dimana masing- masing Bab dibagi lagi menjadi sub-bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan berbagai teori , konsep, definisi konsep, konsep operasional/ variabel penelitian , hipotesis

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data,s populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang keadaan umum kondisi pada Kantor Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) di Provinsi Riau

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian

BAB VI : PENUTUP

1. Diararng mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararng mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pemerintahan Daerah

Definisi Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari Pemerintahan Daerah dan DPRD. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Melalui sistem pemerintahan daerah, pemerintahan daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang diserahkan kepadanya, dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat 3 berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota.
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota.
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota.
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Pada Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam mengatur dan mengurus urusan yang diserahkan kepadanya merujuk pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2016. Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas kebudayaan Provinsi Riau. Yang terdiri dari ketentuan umum, pembentukan organisasi, tata kerja, pembiayaan, dan ketentuan lain-lainnya.

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan

Menurut Anderson, konsep kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2007 : 18)

Kebijakan publik adalah apapun juga yang dipilih oleh pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu itu (whatever government choose to do or not to do) (Nugroho, 2009 : 86).

Carl Friederich (1969) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan- kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Leo Agustino, 2006 : 7)

Defenisi kebijakan menurut Thomas R. Dye yang dikutip Riant Nugroho D (2004:3) adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda. Carl Freidrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan, kesempatan- kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan 12 mengatasi dalam rangka merealisasikan suatu tujuan yang akan dicapai (dalam Winarno, 2004 : 16).

Adapun pendapat David Easton tentang kebijakan adalah sebagai pengaruh (input) dari aktivitas pemerintah (dalam Nugroho, 2004:4). Dalam analisa sistemnya, kemudian Easton menambahkan “suatu konseptualisasi yang telah disiapkan (ready-made) guna membantu mengidentifikasikan dan meneliti permasalahan utama yang akan dihadapi dalam studi keluaran kebijakan (dalam Varma, 2005:291).

Dengan demikian, kebijakan yang diusulkan atau out put yang dihasilkan harus mengandung konsekuensi-konsekuensi moral. Konsekuensi moral tersebut ialah melalui pertimbangan-pertimbangan secara normatif dalam interaksi antara penguasa, penyelenggara dengan masyarakat, serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana seharusnya kebijakan-kebijakan publik itu dilaksanakan (Nugroho, 2003 : 110).

Kebijakan dalam arti peraturan perundangan mempunyai sejumlah bentuk, untuk Indonesia kita melihat tiga jenis kebijakan publik, yaitu yang dibuat oleh legeslatif, eksekutif dan legeslatif bersama eksekutif (dan sebaliknya) (Riant Nugroho, 2009 : 135). Secara umum dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tertinggi di Indonesia dibuat oleh legeslatif, yaitu konstitusi (UU 45) dan ketetapan MPR RI; seperti prinsip dasar teori politik Ttias Politika yang diajarkan Montesquieu pada abad pencerahan di perancis abad ke- 17.

Kebijakan tidak hanya di pahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok atau individu (Budi Winarno, 2007 : 19). 13 Disini Theodore J. Lewi membagi amatan kebijakan public menjadi dua, yakni yang berkenaan dengan substansi dan yang berkenaan dengan prosedur (Winarno, 2003 : 6).

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan (dikutip Dye 1981) berpendapat bahwa kebijakan public hendaklah berisi tujuan , nilai-nilai dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (AG. Subarsono, 2005 : 3).

Ada enam langkah perumusan kebijakan negara yaitu, perumusan masalah kebijaksanaan negara, proses memasukkan agenda masalah kedalam agenda pemerintahan, perumusan usulan kebijaksanaan negara, proses legitimasi kebijaksanaan negara dan penilaian kebijaksanaan (Irfan Islamy, 2004 : 15).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah kebijakan mungkin saja merupakan sesuatu yang tidak di sengaja tetapi ia tetap dilaksanakan dalam implementasi atau praktik administrasi. Makna kata kebijakan juga harus dipahami dalam konteks historis. Pasalnya, sebagaimana konsep publik, maka kebijakan yang senantiasa berubah ini menunjukkan kepada kita perubahan-perubahannya dalam praktik kebijakan (Wayne Parsons, 2006 : 14).

Kebijakan memiliki beberapa implikasi, yaitu :

- a. Titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan berorientasi pada maksud dan tujuan;
- b. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan- keputusan yang tersendiri; c. Kebijakan ialah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur roda pemerintahan;
- c. Kebijakan mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif (Budi Winarno, 2007 : 20).

Ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:

- a. Perumusan kebijakan
- b. Implementasi kebijakan
- c. Evaluasi kebijakan
- d. Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan (Nugroho, 2009 : 145).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Analisis kebijakan adalah suatu aktivitas menciptakan tentang proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab-akibat dan kinerja kebijakan dalam program publik (Harold dan William 2003 : 1). Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2009:494).

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam policy statement. Pada tahap ini pengarahan sumberdaya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, implementasi kebijakan terwujud dari kegiatan-kegiatan yang konkrit (Wahab, 2002 : 64). Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur 15 rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu, tidak salah jika dikatakan implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan (Wahab, 2004 : 59).

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan dalam policy statement. Pada tahap ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengarahan sumberdaya, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, implementasi kebijakan terwujud dari kegiatan-kegiatan yang konkrit (Wahab, 2002 : 64). Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi melainkan lebih dari pada itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan. Oleh sebab itu, tidak salah jika dikatakan implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan (Wahab, 2004 : 59). Implementasi kebijakan merupakan hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul dilapangan. Selain itu, ancaman utama adalah konsistensi implementasi (Lijan, 2008 : 37). Petter de Leon dan Linda de Leon (2004 : 37) mengungkapkan bahwa pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan publik di kelompokkan menjadi tiga generasi yaitu:

- a. Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970-an, memahami implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi antara kebijakan dan eksekusinya.
- b. Generasi kedua, yaitu pada tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah” (top-downer perspective). Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Generasi ketiga, yaitu pada tahun 1990-an. Memperkenalkan pemikiran bahwa variabel perilaku aktor pelaksanaan implementasi kebijakan lebih menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Nugroho, 2009 : 501).

2.2.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan

Adapun yang menjadi hal penentu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat unsur yaitu (AG Subarsono, 2005: 90 - 92) :

- a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan, dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (Target Group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka inilah yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran informasi tersebut (Sugiyono. 2005 : 49).

Oleh sebab itu komunikasi itu harus mempunyai unsur :

- 1) Ketetapan komunikasi dengan pelaksana.
- 2) Konstan/keseragaman.
- 3) Ukuran-ukuran dari tujuan itu harus dinyatakan dengan jelas.
- 4) Mekanisme dari prosedur lembaga terlibat.
- 5) Bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang mereka kerjakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Komunikasi membutuhkan keakuratan.
- 7) Implementasi ini tidak hanya diterima, namun mereka harus juga jalan, jika tidak para implementor akan kacau dengan apa yang seharusnya mereka lakukan.
- 8) Komunikasi ukuran implementasi adalah konsistensinya.
- 8) Penolakan melalui kebijakan biasa mengarah baik pada rintangan total atau distorsi komunikasi (Hassel Nogi, 2003 :45).

b. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber dayamaka untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan secara efektif (Hassel Nogi S, 2003). Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya finansial termasuk berbagai fasilitas sarana dan prasarana, didalam hal tersebut harus memberikan pelayanan. Sumber daya adalah merupakan salah satu faktor penting agar implementasi kebijakan dapat efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi sebatas dokumen saja dan sering tidak mencapai tujuan yang telah dibuat.

c. Disposisi (kecenderungan-kecenderungan)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, contohnya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga tidak menjadi kebijakan (Hassel Nogi, 2003:9).

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standar Operating/SOP), ini menjadi pedoman bagi setiap implementor didalam bertindak. Dan ini berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dari sumber-sumber dari para pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam kerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, ini tetap berlaku karena ketidak aktifan birokrasi Proses kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis, aktifitas politis tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (AG Subarsono, 2005 : 8).

2.2.3. Aktor-aktor Yang Berperan Dalam Proses Kebijakan

Dalam proses kebijakan, menurut Charles Jones (dalam Solichin, 2005 :

29) sedikitnya ada 4 (empat) golongan atau tipe aktor (pelaku) yang terlibat, yakni: golongan rasional, golongan teknisi, golongan inkrementalis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan golongan reformis. Uraian berikut akan menguraikan bagaimana pelaku masing-masing golongan atau aktor tersebut dalam proses kebijakan.

a. Golongan rasional

Dengan metode rasional ini diasumsikan bahwa segala tujuan dapat ditetapkan sebelumnya dan bahwa informasi atau data yang serba lengkap dapat disediakan. Oleh sebab itu gaya kerja golongan rasional cenderung seperti gaya kerja seorang rasional komprehensif, yakni seorang yang berusaha untuk menganalisis semua aspek dari setiap alternatif yang mungkin, berikut semua akibat dan dukungannya terhadap tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

b. Golongan teknisi

Golongan teknisi dalam melaksanakan tugasnya boleh jadi memiliki kebebasan, namun ini sebatas pada lingkup pekerjaan dan keahliannya, peran yang mereka mainkan dalam hal ini sebagai seorang spesialis atau ahli yang membutuhkan tenaganya untuk menangani tugas-tugas tertentu.

c. Golongan inkrementalis

Golongan aktor inkrementalis identik dengan para politisi, cenderung memiliki sifat kritis namun acapkali tidak sabaran terhadap gaya kerja para perencana dan teknisi, walaupun mereka sebenarnya amat tergantung pada apa yang dikerjakan oleh para perencana dan para teknisi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Golongan reformis

Golongan actor reformis pada dasarnya juga mengakui akan terbatasnya informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam proses kebijakan. Nilai-nilai yang mereka junjung tinggi ialah yang berkaitan dengan upaya untuk melakukan perubahan sosial. Gaya golongan aktor reformis ini umumnya sangat radikal, kerap kali disertai dengan tindakan-tindakan demokrasi dan konfrontasi dengan pihak pemerintah. (Solichin, 2005:35).

2.2.4. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan

Pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan adalah :

a. Pemerintah

Pemerintah merupakan abdi masyarakat, maka hendaknya pemerintah dalam mengambil setiap kebijakan harus memperhatikan kepentingan orang banyak (masyarakat atau rakyat). Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL).

b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPRD memiliki peranan yang penting sebagai perwakilan rakyat dalam menyalurkan aspirasinya. DPRD haruslah tetap menjadi cerminan masyarakat yang diwakilinya dalam membuat suatu kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(rakyat), sehingga untuk dapat memenuhi keinginan tersebut DPRD harus melakukan komunikasi dengan masyarakat guna mencari masukan dalam proses perumusan. Hal ini dimungkinkan dalam rangka mencari serta menggali apa yang menjadi keinginan masyarakat.

c. Tokoh Masyarakat

Peran serta tokoh masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan sangat diharapkan peran aktifnya secara tidak langsung karena tokoh masyarakat salah satu tempat masyarakat untuk menyampaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, tokoh masyarakat merupakan orang yang sangat disegani dan dihormati oleh pemerintah.

d. Media Massa

Media dapat ikut berperan dalam proses pengambilan suatu kebijakan, karena media mengupas atau mengangkat isu-isu yang lagi hangat dibicarakan oleh masyarakat dan pemerintahan.

e. Kelompok Kepentingan

Didalam membuat suatu kebijakan pemerintah terkadang harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang tersembunyi, dimana kekuatan-kekuatan tersebut memanfaatkan keadaan yang tidak tertata dengan baik. Kelompok kepentingan tersebut dengan kata lain adalah kekuatan-kekuatan tersembunyi seperti organisasi masyarakat, preman, dan organisasi informal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.5 Proses pembuatan kebijakan

Dalam proses pembuatan kebijakan yang merupakan serangkaian tahap demi tahap yang meliputi:

a. Penyusunan agenda kebijakan

Pada tahap ini terdapat perumusan masalah guna mencari pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap definisi masalah proses pembuatan kebijakan. Perumusan tersebut membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebab, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.

b. Formulasi kebijakan

Tahap ini memerlukan pemahaman yang dapat menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang terjadi dimasa mendatang sebagai tindakan alternatif. Peramalan menguji masa depan yang potensial, secara normative bernilai, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik dari berbagai pilihan (Sujianto, 2008 : 38).

c. Adopsi kebijakan

Dalam tahap ini melakukan rekomendasi terhadap alternatif yang akan dipilih melalui pendekatan pengetahuan yang relevan dengan prinsip-prinsip kenijakan. Rekomendasi membantu etimasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat rasional dan ketidakpastian, mengenali eksternalisasi dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan keputusan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan.

d. Implementasi kebijakan

Pada tahap ini pengambilan kebijakan berusaha melakukan pemantauan (monotoring) tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya atas dasar pengetahuan yang relevan dengan konsep-konsep tersebut. Pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan dari kebijakan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak-letak pihak yang bertanggung jawab pada setiap tahap kebijakan.

e. Evaluasi kebijakan

Dibagian evaluasi membutuhkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan terhadap ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Tujuan ini membantu pengambil kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan, menyumbangkan klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian masalah (Tangkilisan, 2003 : 49).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Aset Daerah/Barang Milik Daerah

Menurut Doli D. Siregar (2004:178) Pengertian Aset secara umum adalah barang (*thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (Perorangan).

Aset adalah barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak (tanah dan atau bangunan) dan barang bergerak, baik berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/ke kayaan atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, institusi atau individu perorangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 yang dimaksud Barang Milik Daerah adalah semua barang yang di beli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Menurut Drs. Nurlan Darise, Ak., M.Si. (2008:59) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dielihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dan selanjutnya menurut Drs. Nurlan Darise, Ak., M.Si dalam buku lainnya buku pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) (2008:240-241) Aset diklasifikasikan kedalam aset lancar dan non lancar, Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persediaan, pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjual belikan, pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda penjualan angsuran, Tuntutan ganti rugi dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan serta Persediaan mencakup atau perlengkapan yang dibeli dan di simpan untuk digunakan. Sedangkan aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, cadangan dan aset lainnya.

Menurut Mahmudi (2010:146) Aset Daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjelaskan bahwasanya Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang di beli atau diperoleh atas badan APBN/APBD ; barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibah, sumbangan, dari perjanjian / kontrak diperoleh dari ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan menurut Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27

Tahun 2014 ini yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah :

1. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Adapun Ruang Lingkup Barang Milik Negara/Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 meliputi :

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD;
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu :
 - a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. Barang yang diperoleh sebagai berdasarkan ketentuan undang-undang.
 - d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Manajemen Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah

Menurut Doli D. Siregar (2004 : 518) Manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di masyarakat.

Manajemen aset sendiri dapat dibagi dalam lima tahapan kerja, yaitu inventarisasi aset, legal audit penilaian aset, optimalisasi aset dan pengembangan SMA (sistem informasi manajemen aset). Kelima tahapan kerja ini saling berhubungan dan terintegrasi. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Inventarisasi Aset

Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume/jumlah, jenis alamat dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses Kerja yang dilakukan adalah pendataan, koodifikasi/*labeling*, pengelompokan dan pembukuan/administrasi sesuai dengan manajemen aset.

2. Legal Audit

Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset, identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan atau pengalihan aset. Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak penguasa yang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindahtanganan aset yang tidak termonitor, dan lain-lain.

3. Penilaian Aset

Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh konsultan penilaian yang indenpenden. Hasil dari nilai tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Optimalisasi Aset

Optimalisasi Aset merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomi yang dimiliki aset tersebut. Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi dan dikelompokkan atas aset yang memiliki potensi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tentunya kriteria untuk menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan dan pengalihan aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan kepada Pemda saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja aspek ini adalah pengembangan SIMA. Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan dan pengendalian yang lemah. Dalam SIMA ini keempat aspek itu diakomodasi dalam sistem dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambahkan aspek pengaawasan dan pengendalian. Sehingga setiap penanganan terhadap satu aset, termonitor jelas, mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab menanganinya.

2.4.1 Penghapusan dan Pemusnahan Barang Milik Daerah

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 : Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau penguasa pengguna barang dan/atau pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasanya.

Menurut Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 : Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan barang milik Negara/Daerah

2.4.2 Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah

Menurut Permendagri nomor 19 tahun 2016 pasal 421/422/423.

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila:

1. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau
2. Terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pemusnahan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang.
- c. Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

Pasal 423 Pemusnahan dilakukan dengan cara:

- a. Dibakar;
- b. Dihancurkan;
- c. Ditimbun;
- d. Ditenggelamkan; atau
- e. Cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.4.3 Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Penghapusan Meliputi :

Penghapusan barang milik daerah meliputi:

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
- b. penghapusan dari Daftar Barang Pengelola; dan
- c. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 432 (1) Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Penghapusan dari Daftar Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang.

(3) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena:

- a. pemindahtanganan atas barang milik daerah;
- b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- c. menjalankan ketentuan undang-undang;
- d. pemusnahan; atau
- e. sebab lain.

Pasal 433 (1) Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena:

- a. penyerahan barang milik daerah;
- b. pengalihan status penggunaan barang milik daerah;
- c. pemindahtanganan atas barang milik;
- d. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
- e. menjalankan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. pemusnahan; atau
- g. sebab lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

(2) Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g. merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti, hilang karena kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluwarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

Pasal 434

(1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengguna Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 ayat (1) untuk barang milik daerah pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan keputusan penghapusan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

(3) Dikecualikan dari ketentuan mendapat persetujuan penghapusan Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk barang milik daerah yang dihapuskan karena:

- a. pengalihan status penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 60;
- b. pemindahtanganan; atau
- c. pemusnahan.

(4) Gubernur/Bupati/Walikota dapat mendelegasikan persetujuan penghapusan barang milik daerah berupa barang persediaan kepada Pengelola Barang untuk Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna.

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

(5) Pelaksanaan atas penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

2.4.4 Dasar Penghapusan

Barang Tidak Bergerak :

1. Rusak berat, terkena bencana
2. Tidak dapat digunakan secara optimal
3. Terkena planologi (perencanaan pembangunan) kota
4. Kebutuhan organisasi.
5. Penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi.

Barang Bergerak ;

Pertimbangan Teknis :

1. Secara fisik tidak dapat digunakan
2. Akibat mordinisasi
3. Telah melampaui batas waktu
4. Megalami perubahan dasar spesifikasi
5. Selisih kuerang akibat penggunaan/susut

Pertimbangan Ekonomi :

1. Jumlah berlebih
2. Secara ekonomis lebih untung apabila dihapus

Karena Hilang ;

1. Kesalahan kelalaian bendaharawan barang/pemegang barang
2. Mati bagi tanaman/hewan ternak
3. karena kecelakaan atau alasan tidak terduga (force majeure)

2.4.5 Kewenangan Penghapusan Barang Milik Daerah

Untuk barang tidak bergerak seperti Tanah dan/ atau bangunan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk barang-barang inventaris lainnya selain tanah dan/atau bangunan sampai dengan Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

2.4. Proses Penghapusan Barang Milik Daerah

Kepala Daerah membentuk Panitia Penghapusan Barang Milik Daerah

1. Panitia penghapusan Barang Milik Daerah yang susunan personilnya terdiri dari unsur teknis terkait Panitia penghapus Meneliti
2. Barang yang rusak, dokumen kepemilikan, administrasi, penggunaan, pembiayaan, pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang dipandang perlu
3. Dituang dalam Berita Acara dengan melampirkan data kerusakan, laporan hilang dari kepolisian, surat keterangan sebab kematian dan lain-lain

Pengelola mengajukan permohonan persetujuan kepada Kepala Daerah

1. Mengenai rencana penghapusan barang dimaksud dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian Panitia Penghapusan Pelaksanaan Penghapusan
2. Mendapat persetujuan Kepala Daerah, penghapusan ditetapkan dengan SK Pengelolaan Kepala Daerah, menetapkan cara penghapusan : lelang dan/atau disumbangkan /dihibahkan atau dimusnahkan
3. Apa bila Lelang Terbatas, Kepala Daerah membentuk Panitia Pelelangan Terbatas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang (Mutasi).

Penghapusan Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal barang tersebut sudah tidak berada pada daftar Barang Daerah.

Penghapusan barang Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang dimaksud :

1. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangkan.
2. Alasan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Penghapusan Khusus :

Penghapusan gedung milik Daerah yang harus segera dibangun kembali (rehab total) sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifatnya mendesak dan membahayakan, penghapusan nya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

Dalam keadaan bangunan yang membahayakan keselamatan jiwa dapat dilakukan pembongkaran terlebih dahulu sambil menunggu Keputusan kepala Daerah.

Alasan Penghapusan Khusus :

Rusak Berat yang disebabkan oleh kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa dan mengakibatkan robohnya bangunan gedung tersebut.

Rusak berat yang disebabkan oleh bencana alam seperti: gempa bumi, banjir angin topan, kebakaran dan yang sejenis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.1 Instrumen Hukum Penghapusan

Peran instrumen hukum sangat penting dalam rangka penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah. Dengan adanya pengaturan yang memadai mengenai penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah antara lain dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam mengawasi pengelolaan barang milik daerah terutama terkait dengan penghapusan.

Instrumen-instrumen hukum nasional yang mengatur tentang penghapusan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pada pasal 37 Ayat (1) dijelaskan bahawa “Piutang negara/ daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan, kecuali mengenai piutang negara/daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman

Teknis Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Pasal 432:

- (1) Penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kauasa pengguna sebagaimana dimaksud pada pasal 321 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak ada dalam penguasaan pengguna barang dan/atau penguasa pengguna barang. (2) Penghapusan dari daftar barang pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 431 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah tidak berada dalam penguasaan pengelola barang. (3) Penghapusan dari daftar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 341 huruf c dilakukan dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebabkan karena :

- a. Pemindah tangan atas barang milik daerah
- b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya
- c. Menjalankan ketentuan undang-undang
- d. Pemusnahan; atau
- e. Sebab lain

Dalam proses penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) telah diatur dasar penghapusannya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 (2016: 252) menyatakan bahwa dasar-dasar penghapusan BMD adalah sebagai berikut:

Barang milik daerah sudah tidak ada berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang disebabkan karena :

- a. Penyerahan barang milik daerah Pengalihan status penggunaan barang milik daerah
- b. Pengalihan status penggunaan barang milik daerah.
- c. Pemindahtanganan atas barang milik.
- d. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.



- e. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pemusnahan.
- g. Sebab lain.

Sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sebab-sebab yang secara normal dipertimbangkan wajar menjadi penyebab penghapusan, seperti : hilang karena kecurian terbakar, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (force majeure).

2. Pandangan Islam terhadap Pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah

Kekayaan publik merupakan kekayaan khusus, dimana pemerintah berhak mengatur dan mengelolanya, bahkan mendistribusikannya kepada masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan Abu Yusuf bahwa uang publik adalah amanah yang akan diminta pertanggung jawaban, maka harus digunakan sebaik- baiknya untuk untuk kemaslahatan rakyat. Pengertian pengawasan harta dalam aturan harta islam kadang tidak berbeda menurut 37 para penulis modern dalam harta umum. Makna modal (harta) secara umum ialah segala sesuatu yang disukai manusia, seperti hasil pertanian, perak atau emas, ternak, atau barang- barang lain yang termasuk perhiasan dunia. Adapun tujuan pokok dari harta itu ialah membantu untuk memakmurkan bumi dan mengabdikan kepada Allah SWT. Menurut mazhab Hanafi adalah sesuatu yang layak dimiliki menurut syarat yang dimanfaatkan, disimpan/ dikuasai dan bersifat konkret. Mazhab Hambali juga mendefinisikan hak milik menjadi dua macam. Pertama, sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi. Kedua, melindungi undang- undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harta (kekayaan atau hak milik) pada dasarnya diklasifikasikan menjadi dua yaitu: materi dan non materi. Contoh yang berwujud materi adalah uang, perhiasan, tanah, dan lain sebagainya. Sedangkan harta yang berwujud non materi adalah deposito, HAKI (hak atas kekayaan intelektual), saham, dan lain sebagainya. Menurut Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, harta terbagi menjadi berbagai macam tergantung dengan orientasi pembagiannya. Diantar bentuk klasifikasi tersebut adalah harta tetap atau diam dan harta bergerak. Harta tetap atau diam adalah harta yang tidak mungkin dipindahkan seperti tanah dan yang melekat dengan tanah, seperti bangunan permanen. Harta bergerak adalah harta yang dapat dengan cepat dipindahkan dan dialihkan.

Ada 3 point penting dalam pengelolaan harta kekayaan dalam islam (sesuai Al-Qur'an dan Hadits) yaitu :

1. Larangan mencampur-adukan yang halal dan batil. Hal ini sesuai dengan Q.S Al-Fajr ayat 19

وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا

Artinya: "Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dengan yang bathil"

2. Larangan mencintai harta secara berlebihan. Hal ini sesuai dengan QS.AlFajr ayat 20

وَمُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا

Artinya: "Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan"

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW bersabda yang artinya ”Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta. Namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang merasa cukup. “ (HR.Bukhari no.6446 dan Muslim no.1051).

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

Menurut Umar Anshary Sitanggal (2008:118) pandangan islam mengenai harta dapat diuraikan sebagai berikut:

Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini adalah Allah SWT, kepemilikan oleh manusia bersifat relative, sebatas untuk melaksanakan amanah mengelolah dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuanNya.

Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda: “Seseorang pada hari akhir nanti pasti akan ditanya atas empat hal: usianya untuk apa dihabiskan, jasmaninya untuk apa dipergunakan, hartanya dimana didapatkan dan untuk apa dipergunakan, serta ilmunya untuk apa dipergunakan.

Status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai berikut:

- a. Harta sebagai amanah (titipan) dari Allah SWT, manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mampu mengadakan benda dari tiada.
- b. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih- lebihan (Ali Imran:14).

Sebagai perhiasan hidup harta sering meyebabkan keangkuhan, kesombongan serta kebanggaan diri.

- c. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini menyangkut soal cara mendapatkannya dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak (Al-Anfal:28)

Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka pemikiran penelitian. Selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada, serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Sapjeriani (2018) penulis memilih judul Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional dan untuk mengetahui penyebab kendala yang terjadi dalam prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam pembuatan laporan ini yaitu menggunakan metode observasi, wawancara langsung kepada pegawai BPKAD Kota Jambi, selain itu penulis juga melakukan dokumentasi dan studi pustaka untuk menunjang terpenuhinya laporan magang ini. Adapun hasil laporan mangang ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional dan untuk mengetahui apa saja penyebab kendala yang menyebabkan timbulnya kendala dalam prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional berdasarkan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 pada BPKAD Kota Jambi. Dalam penelitian ini, melalui wawancara dengan Kabid Aset BPKAD Kota Jambi, dapat penulis ketahui bahwa prosedur penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan operasional menunjukkan bahwa secara keseluruhan prosedur yang dilakukan BPKAD Kota Jambi sudah efektif dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 namun masih terdapat kendala dikarenakan kurang optimalnya pencatatan, pemeriksaan dan pengamanan yang menimbulkan perubahan dalam penyajian nilai aset pada neraca.

2. Siti Iramaya Hasibuan, (2018) Dalam hal ini meneliti dengan judul penelitian Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan

Barang Milik Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan instansi pemerintah daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk bertanggung jawab dalam hal pengelolaan barang dan aset daerah termasuk dalam hal proses penghapusan Barang dan Aset di daerah. Gedung perkantoran BAPPEDA dan Bina Graha sudah berumur lebih dari 40 tahun dan penataan awalnya tidak terstruktur maka perlu dilakukan antisipasi yang bersifat segera agar tidak terjadi hal yang membahayakan keselamatan pegawai atau ASN.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk menganalisis implementasi penghapusan aset daerah yaitu gedung BAPPEDA dan Bina Graha maka penulis menggunakan teori implementasi George C. Edward III yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan publik yang dimaksud tersebut merujuk pada empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi. Ada pun bentuk dan jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menjelaskan secara menyeluruh proses penghapusan aset milik daerah. Pada proses penghapusan aset milik daerah dapat dijelaskan berdasarkan indikator teori bahwa dari sisi komunikasi, disposisi dan struktur organisasi sudah terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Namun yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya adalah masalah sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Akibat permasalahan sumber daya tersebut maka implementasinya belum terlaksana sampai sekarang meski pun dari sisi administrasi telah selesai di atas kertas. Dengan demikian Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 telah terlaksana dari sisi administrasi namun pelaksanaannya di lapangan belum dapat di realisasikan karena terkendala masalah sumber daya baik finansial maupun sumber daya manusia.

Yoanda Hidayat, (2015) Dalam hal ini meneliti dengan judul penelitian Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengaraian Kabupaten Kampar, Yoanda Hidayat dalam hal ini meneliti berdasarkan fenomena yang terjadi pada Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengaraian Kabupaten Kampar, yaitu banyak aset dalam kondisi rusak sebanyak 65, hilang 36 dan dalam pengerjaan 2 dari 686 aset tetap yang ada dan tidak terkelola dengan baik, dimana minimnya pengelolaan aset Negara seperti perawatan, penyimpanan, pemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Barang Milik Daerah pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengaraian Kabupaten Kampar. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : Pengelolaan Barang Milik Negara seperti perawatan, penyimpanan dan pemanfaatan belum berjalan dengan baik dimana masih banyaknya sumber daya manusia yang belum handal dan paham dalam bidangnya sehingga dalam menjalankan pengelolaan aset Negara/Barang Milik Daerah seperti perawatan, penyimpanan dan pemanfaatan tidak terurus atau tidak tetap pengelolaannya. Perbedaan penelitian Yoanda Hidayat dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu Penelitian yang dilakukan Yoanda Hidayat lebih cenderung mengulas dan menfokuskan penelitian tentang pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang di analisis adalah tentang perawatan, penyimpanan, dan pemanfaatan Barang Milik Negara. Sedangkan Peneliti melakukan penelitian dan menganalisa mengenai pelaksanaan penatausahaan aset daerah, yaitu pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah berserta kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dan upaya yang dilakukan dilapangan pada BPKAD Kabupaten Rokan Hulu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Defenisi Konsep

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengajukan defenisi konsep dalam penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Penghapusan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Milik Negara/Daerah
- b. Aset Daerah adalah semua kekayaan daerah yang dimiliki maupun dikuasai pemerintah daerah, yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, misalnya sumbangan, hadiah, donasi, wakaf, hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga, dan sebagainya.

2.10 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pengukuran ini dapat diketahui indikator indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.

Tabel 2.1 Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub-Indikator
Penghapusan Barang Milik Daerah	1. Pemindahtanganan	a. Penjualan; b. Tukar menukar; c. Hibah; atau d. Penyertaan modal pemerintah daerah.
	2. Putusan pengadilan	a. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
	3. Ketentuan undang-undang;	a. Penghapusan karena melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Pengajuan permohonan surat penerbitan penghapusan kepada gubernur oleh pengurus barang
	4. Pemusnahan; atau	a. Dibakar; b. Dihancurkan; c. Ditimbun; d. Ditenggelamkan; atau Cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	5. Sebab lain.	a. Hilang karna kecurian, b. Terbakar,susut,menguap, mencair,kadaluarsa,mati untuk hewan/ikan/tanaman. c. Keadaan kahar (force majeure).

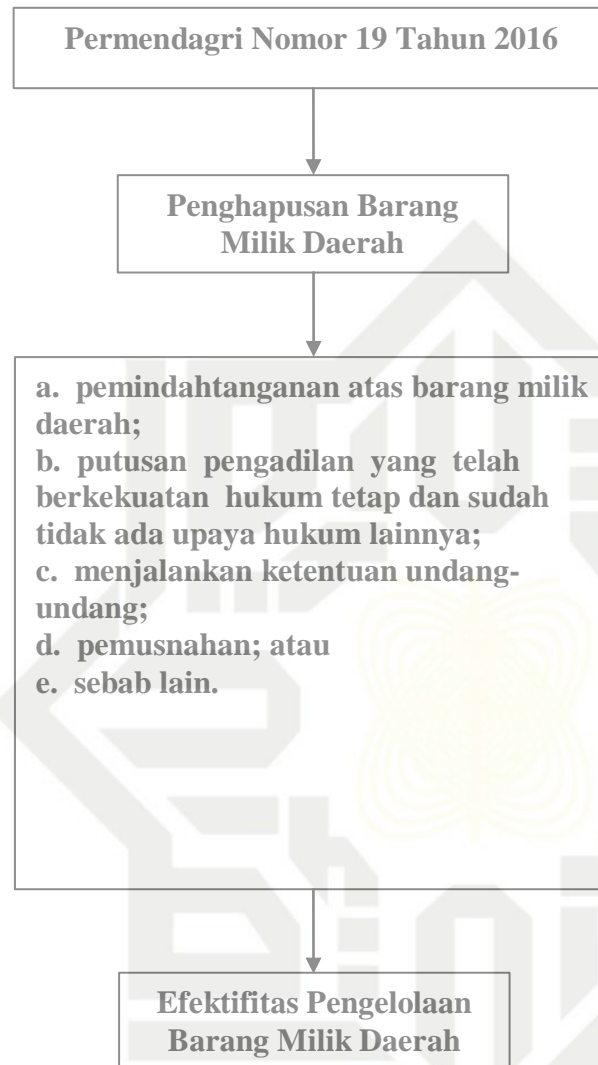
Sumber : *Permendagri Nomor 19 tahun 2016*

2.1 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam Sugiono, (2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di indentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka Pemikiran bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka pikiran dalam penelitian ini adalah :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber : Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Waktu Penelitian dilakukan sejak bulan September 2019 sampai 06 april 2020.

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini menurut Sugiyono (2005:11) adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu keadaan atau penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau hubungan antara variabel satu dengan variabel lain.

3.3 Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Data primer, Menurut Istijanto (2006:12) data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian yaitu observasi berupa pendapat informan tentang pelaksanaan penghapusan barang milik daerah serta hasil wawancara dengan informan penelitian untuk memperjelas hasil dari observasi tersebut.

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui wawancara yang didapat dari informan dan hasil observasi dilapangan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data Sekunder, umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data Sekunder ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk jadi yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Data yang diperoleh dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang berupa struktur organisasi serta rincian tugas pokok dan fungsi pegawai.

3.4 Informan Penelitian

Penentuan informan sebagai sumber data dilakukan dengan pertimbangan yaitu : informan adalah orang yang dianggap mengetahui tentang apa yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Dalam pelaksanaan penelitian ini wawancara akan dilakukan terhadap informan yang mengetahui penghapusan barang milik daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yaitu :

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Table 3.1.Key Informan

No	Nama
1.	Kepala BPKAD
2.	Sekretaris BPKAD
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
4.	Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah
6.	Staf penghapusan pengelola barang
7.	Staf penghapusan pengelola barang
8.	Staf pengurus barang milik daerah

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2019

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menurut sugiono (2014:188-198) sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data-data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu. Dimana dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data dilapangan dengan mengamati secara langsung bagaimana proses kerja yang dilakukan pegawai kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menghasilkan data berupa dan transkrip wawancara. Yaitu sebagai pengamatan terhadap pola perilaku manusia dalam situasi tertentu, untuk mendapatkan informasi tentang fenomena yang diinginkan.

Dalam mengumpulkan data, peneliti mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai yang mengetahui pasti masalah pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (Moleong, 2005:217)

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk mengelompokkan pengurutan data ke dalam ketentuan-ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil sesuai dengan data yang telah didapatkan. Dalam penelitian ini penulis teknik analisis data kualitatif deskriptif (Sugiyono, 2014:60)

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menganalisis data menurut Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2014:246-252) yaitu :

1. Reduksi data

Mereduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abtaksi dan pentransformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Data yang sudah direduksi dapat membantu peneliti dalam pengumpulan data yang tepat dan akurat.

2. Penyajian data,

Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari lapangan yang dituangkan berbentuk teks dengan sebaik mungkin tanpa adanya rekayasa dan penambahan yang tidak sesuai dengan penelitian. Hal tersebut dilakukan bertujuan agar penyajian data yang telah direduksi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini peneliti telah berusaha menyajikan data yang tepat dan akurat sesuai dengan permasalahan dan keadaan yang terdapat pada objek penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah semua data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian diperoleh serta menghubungkan dengan teori yang sesuai dengan permasalahan pada penelitian. Maka barulah didapatkan kesimpulan yang sempurna yang sesuai dengan jenis dan permasalahan penelitian. Dari beberapa data yang diperoleh kemudian dikembangkan dengan kerangka pemikiran dan teori yang telah didapat agar kesimpulan akhir sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melenceng dari permasalahan.



BAB IV

GAMABARAN UMUM PENELITIAN

4. Sejarah Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Provinsi Riau

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah perangkat daerah Provinsi Riau terbentuk pada tahun 2015, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang organisasi Inspektorat, Bappeda, dan lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah provinsi Riau resmi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada awal tahun anggaran tahun 2015 bersamaan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2015. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Selain berfungsi sebagai pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, pertatausahaan, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Badan Keuangan Dan Aset Daera Provinsi Riau juga berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah, sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan penggabungan dua bagian sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau, yaitu bagian keuangan dan bagian perlengkapan. Penggabungan dua bagian tersebut

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertujuan untuk memaksimalkan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan dan aset di lingkungan pemerintah Provinsi Riau sebagai komitmen nyata pemerinah Provinsi Riau, dalam melaksanakan tugas dan fugsinya sebagai perangkat Daerah pada tahun 2019 menyusun Racangan awal Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau Tahun 2020.

4.2 Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

4.2.1 Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Visi disini adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode yang akan menjadi pemandu dalam mencapai masa depan. Dengan demikian, visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam jangka menengah.

Berpedoman dari pengertian diatas maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Riau memiliki visi adalah sebagai berikut “Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermartabat dan unggul di Indonesia (Riau bersatu)”

4.2.2 Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau akan menjabarkan kedalam misi yang lebih jelas. Karena misi adalah merupakan suatu cita-cita atau tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan melalui penerapan strategi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dipilih suatu cita-cita atau tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan melalui penerapan strategi yang dipilih dalam penentuan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dengan berdasarkan pengkajian dan pembahasan yang mendalam, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menentukan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

4. Kedudukan, Tupoksi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkendudukan dibawah Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Tugas dan Fungsi Pejabat beserta Perangkat Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau antara lain :

1. Kepala Badan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;

- a. Penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;

- a. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Subbagian Kepegawaian Umum.
- b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;

- a. Merencanakan program/kegiatan penganggaran Subbagian Perencanaan Program;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbagian Perencanaan Program;
- c. Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana program/kegiatan dari masing – masing bidang;
- d. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur
- f. Menyiapkan data dan usulan belanja hibah/bantuan sosial untuk bahan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- g. Menyiapkan bahan dan rancangan pengembangan Sistem dan Informasi Keuangan Daerah;
- h. Mengelola sistem informasi keuangan daerah website, situs serta portal Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Mempersiapkan bahan – bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan serta rapat koordinasi teknis
 - j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan Program
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. Melakukan urusan perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 - e. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;
 - f. Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - g. Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melaksanakan penyelesaian tindak Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
 - i. Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
 - j. Melaksanakan verifikasi dan pertanggung jawaban anggaran;
 - k. Mela
 - l. kukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;Melaksanakan penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pengelolaan keuangan dan aset;
 - m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Keuangan Barang Milik Daerah;
 - n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
5. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut ;
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - c. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
 - d. Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan;
- f. Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
- g. Membuat laporan perkembangan kepegawaian;
- h. Menyelenggarakan urusan kehumasan;
- i. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
- k. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
- l. Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- m. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Anggaran Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;

- a. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang penyusunan anggaran, Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran, dan Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Anggaran Daerah;
 - c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Anggaran Daerah;
 - d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
7. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penyusunan Anggaran;
 - b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Penyusunan Anggaran;
 - c. Melaksanakan review atas usulan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. Melakukan verifikasi dan evaluasi rancangan anggaran kas pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan penyusunan dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kegiatan pada Subbidang Penyusunan Anggaran;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

8. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran mempunyai Fungsi dan Tugas sebagai berikut ;

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
- c. Menyelenggarakan pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Menyiapkan bahan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
- e. Menyiapkan dan menyusun pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- f. Menyiapkan bahan dan analisis usulan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g.

Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas kegiatan pada Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran; melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya

9. Kepala Sub Bidang Fasilitas dan Pembinaan Anggaran mempunyai Fungsi dan Anggaran sebagai berikut ;

a.

Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Fasilitas dan Pembinaan Anggaran;

b.

Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Fasilitas dan Pembinaan Anggaran;

c.

Melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

d.

Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

e.

Melaksanakan fasilitasi terkait pengelolaan anggaran Kabupaten/Kota;

f.

Melakukan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;

g.

Menghimpun dan mengolah data anggaran Kabupaten/Kota;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;

- a. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penerimaan Daerah, Subbidang Pengelola Kas Daerah dan Subbidang Belanja Daerah.
- b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

1. Kepala Sub Bidang Penerimaan Kas Daerah memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut atas Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. Melaksanakan fasilitasi terkait pengelolaan anggaran Kabupaten/Kota;
 - f. Melakukan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - g. Menghimpun dan mengolah data anggaran Kabupaten/Kota;
 - h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran; Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
1. Kepala Sub Bidang Belanja Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;
- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Belanja Daerah;
 - b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Belanja Daerah;



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan registrasi Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah;
- d. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen Surat Perintah Membayar;
- e. Melaksanakan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana;
- f. Melaksanakan pengadministrasian, laporan pemungutan dan pemotongan Piutang Pihak Ketiga;
- g. Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah;
- h. Menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- i. Melaksanakan kordinasi dan pembinaan perbendaharaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah;
- j. Melaksanakan verifikasi terhadap laporan Pengesahan Surat Pertanggungjawaban dan fungsional;
- k. Melaksanakan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana dengan rekening koran;
- l. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Belanja Daerah; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Sub Bidang Pengelola Kas Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut
 - a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pengelola Kas Daerah;
 - b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Pengelola Kas Daerah;
 - c. Melakukan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank yang telah ditunjuk;
 - d. Menyiapkan dokumen Surat Penyediaan Dana dan Uang Persediaan;
 - e. Melakukan verifikasi administrasi dan rekomendasi usulan penunjukkan Bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah;
 - f. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - g. Mempersiapkan buku kas umum bendahara umum;
 - h. Melakukan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas Surat Perintah Pencairan Dana dengan rekening Koran;
 - i. Melaksanakan analisa data penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah dan penempatan kelebihan kas dalam bentuk setara kas dan/atau investasi jangka pendek;
 - j. Melaksanakan pengelolaan kas anggaran;
 - k. Melaksanakan penyusunan anggaran kas Pemerintah Provinsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menyusun, menyediakan, dan menyampaikan laporan posisi kas secara periodik;
 - m. Menyimpan uang dan surat berharga;
 - n. Melakukan proses penerbitan Keputusan Gubernur tentang pembukaan dan penutupan rekening bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah, dan seluruh rekomendasi dan perikatan pendukung pelaksanaan perbendaharaan;
1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;
- a. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi, Subbidang Analisa Data dan Pelaporan, dan Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan.
 - b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Anggaran Daerah;
 - c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Konsolidasi mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi;
- c. Menghimpun dan memvalidasi Surat Perintah Pencairan Dana Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- d. Melakukan Jurnal Konsolidasi;
- e. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Bulanan dan Triwulanan Pemerintah Provinsi;
- f. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Semester Pertama dan prognosis Pemerintah Provinsi untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- g. Menganalisa jurnal memorial Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
- h. Menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi dan Catatan atas Laporan Realisasi Anggaran;
- i. Menyusun Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih Pemerintah Provinsi dan Catatan atas Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih;
- j. Menyusun Neraca Pemerintah Provinsi dan Catatan atas Neraca;
- k. Mengkompilasi dan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau dan Catatan Atas Laporan Keuangan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
1. Kepala Sub Bidang Analisa Data dan Pelaporan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;
 - a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
 - b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
 - c. Melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan akuntansi dan pelaporan pada entitas akuntansi;
 - d. Menghimpun, verifikasi dan rekonsiliasi Surat Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara;
 - e. Menghimpun, verifikasi dan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Bulanan dan Triwulanan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - f. Menghimpun, verifikasi dan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggraan Semester Pertama dan Prognosis enam bulan berikutnya Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - g. Menghimpun dan menganalisa Kelengkapan Dokumen Jurnal Memorial;



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Menghimpun dan melakukan verifikasi Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- i. Melakukan Rekonsiliasi Aset di Neraca dan Sistem Barang Milik Daerah;
- j. Menyusun Laporan Operasional Pemerintah Provinsi dan Catatan atas Laporan Operasional;
- k. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Provinsi dan Catatan atas Laporan Perubahan Ekuitas;
- l. Menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi dan Catatan atas Laporan Arus Kas;
- m. Menyiapkan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- n. Menganalisa dan menyusun kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi;
- o. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Analisa Data dan Pelaporan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Kepala Sub Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Anggaran Daerah;
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
18. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;
 - a. Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, dan Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - b. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - c. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

19 Kepala Sub Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi senagai berikut ;

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- c. Melaksanakan proses penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- d. Melaksanakan proses penyusunan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- e. Melaksanakan pendataan/inventarisasi dan penyusunan laporan barang milik daerah;
- f. Mengumpulkan, menyusun dan meneliti daftar rekapitulasi hasil pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- g. Mengumpulkan, menyusun dan meneliti laporan daftar inventarisasi barang dan rekapitulasi daftar inventarisasi barang milik daerah;



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

20 Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah;
- c. Melaksanakan proses penetapan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
- d. Melaksanakan proses pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah pada pengelola barang;
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah;
- f. Menyimpan seluruh dokumen asli kepemilikan barang milik daerah Pemerintah Provinsi;
- g. Mengelola dan mengoptimalkan barang milik daerah;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

21. Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut ;

- a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- c. Melaksanakan proses penilaian barang milik daerah; Melaksanakan proses pemindahtanganan barang milik daerah;
- d. Melaksanakan proses pemusnahan barang milik daerah
- e. Melaksanakan proses penghapusan barang milik daerah;
- f. Menyiapkan bahan dan data Tuntutan Ganti Rugi terkait barang milik daerah;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;

- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bagan Struktur Organisasi Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang penulis kemukakan, maka penulis dapat berkesimpulan tentang Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penghapusan aset Pada Kantor Badan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sesuai dengan peraturan yang berlaku pada pasal 431 Permendagri no. 19 tahun 2016 Tentang penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah, walaupun masih terdapat kekurangan seperti belum terlaksananya semua cara penghapusan pada kantor BPKAD Provinsi Riau, dan BPKAD Provinsi Riau sudah pernah melaksanakan penghapusan dengan 2 (dua) cara, yaitu penghapusan karena pemindahtanganan karena hibah dan penghapusan karena sebab lain-lain/kehilangan.
2. Kondisi yang melatarbelakangi penghapusan aset pada Kantor Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, sebabnya antara lain aset telah rusak berat dan sudah tidak dapat digunakan lagi atau dimanfaatkan. Sehingga aset sudah layak untuk dihapuskan dengan menempuh tata cara yang berlaku sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kendala-kendala yang mempengaruhi pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada kantor BPKAD Provinsi Riau yaitu :
 - a. Kantor BPKAD belum pernah melakukan penghapusan dengan semua cara, Penghapusan yang sudah pernah dilakukan yaitu dengan cara Pemindahtanganan/ pindah catat Penggunaan Mobil Pajero Sport dari Kantor BPKAD ke DPRD dan Penghapusan 3 Unit PC komputer dengan alasan karena Hilang.
 - b. Ada sebagian Aset dalam kondisi hilang dan rusak berat seperti Minibus/Nissan Grandlivina 1.5 1.5 SV (4X2) MT dalam kondisi rusak berat, Pickup/ Ford Ranger Single dalam kondisi Rusak berat dan Laptop Acer Aspire/12jat 10 / 2930-581G32Mn kondisi Hilang belum dihapuskan pada kantor BPKAD provinsi Riau hal ini menyebabkan kerugian pada kantor BPKAD dengan mengeluarkan biaya pemeliharaan.
 - c. ketidaklengkapan dokumen serta ketidakjelasan fisik barang yang diusulkan untuk dihapuskan, Hal tersebut disebabkan karena beberapa proses yaitu proses pemindahtanganan dimasalahkan yang tidak disertai dokumen administrasi yang tidak lengkap.
 - d. Seringnya terjadi perpindahan kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga mengakibatkan Sumber Daya Manusia banyak yang tidak serius dalam memahami proses penghapusan Barang Milik Daerah.

6.4. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik kesimpulan, penulis dapat memberi saran yang dapat dipertimbangkan bagi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. adapun saran yang harus penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Barang milik daerah yang seharusnya sudah layak untuk dihapuskan akan tetapi belum terhapuskan dikarenakan tidak memiliki kelengkapan dokumen administrasi yang tidak lengkap sehingga tidak bisa dihapuskan maka penulis berpendapat bahwa kepala daerah harus membenahi aturan yang ada untuk meringankan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang sudah lama tidak terhapuskan, hal ini dikarenakan lebih untung apabila barang milik daerah tersebut dihapuskan serta tidak mengeluarkan anggaran biaya pemeliharaan sehingga lebih menguntungkan pemerintah daerah.
2. Bagi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah yang maksimal merupakan nilai tambah dan citra yang baik dalam mengedepankan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
3. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dimanfaatkan serta bisa menjadi bahan informasi bagi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan seluruh pihak yang terkait.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan terjemahannya

Qs Al anfal ayat 28

Qs Al fajr ayat 19-20

Qs Al Imran ayat 18

Buku-buku

Sugiyono.2009.*Metodologi Penelitian Administrasi*.Alfabeta, Bandung

Sugiyono.2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*.Alfabeta, Bandung.

Hassel Nogi S. Tangkilisan, M.S, Drs, 2003. *Kebijakan Publik yang membumi, konsep, Strategi dan kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI.

Darise, Nurlan,2008. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah*, PT.Indeks, Jakarta

Darise, Nurlan,2009. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*, PT.Indeks, Jakarta

D. Siregar, Doli, 2004. *Manajemen Aset*, GRAMEDIA.

Mahmudi.2009. *Manajemen Keuangan Daerah*,Yogyakarta Erlangga.

Negroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, FORMULASI, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta:Gramedia

Peraturan dan Perundang-undangan

Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintrah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Daerah provinsi Riau nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Gubernur No. 92 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi badan Pengelolaan keuangan dan aset daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sapjariani (2018) *Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi.*

S Iramaya Hasibuan, (2018) *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.*

Yeanda Hidayat, (2015) *Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Pengaraian Kabupaten Kampar.*

Virna Muzeliza, SE,M.Si. 2016. *Analisis Pelaksanaan Aset Tetap pada BPKAD Kota Pekanbaru.*

Referensi lainnya

<http://barang.milik.Negara.Blogspot.com/2019/03/asas.umum.pengelolaan.barang.milik.Negara.html>

<http://id.Wikipedia.Org/wiki/Aset.Tetap>

<Http://nurfaizinyunus.blogspot.com/2015/03/reporting-pelaporan.html?m=1>

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PEDOMAN WAWANCARA

ANALISIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH OLEH KANTOR BANDAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

A. PEMINDAHTANGANAN

1. barang yang seperti apa yang bias di pindahtanganan?
2. Bagaimana mekanisme pemindahtanganan penjualan?
3. Bagaimana mekanisme pemindahtanganan tukar menukar?
4. Bagaimana mekanisme pemindahtanganan dalam hiba?
5. Bagaimana cara pernyataan modal barang milik daerah?
6. Apakah kantor BPKAD pernah melakukan pemindahtanganan?

B. PUTUSAN PENGADILAN

- a. penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

C. KETENTUAN UNDANG UNDANG

- a. pengurus barang mendata barang yang akan dihapuskan.
- b. Pengajuan permohonan surat penerbitan penghapusan kepada gubernur oleh pengurus barang

D. PEMUSNAHAN

1. bagaimana kriteria pemusnahan barang yang dibakar ?
2. barang yang di hancurkan?
3. Bagaimana kriteria pemusnahan barang yang ditimbun?

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagaimana kriteria pemusnahan barang yang ditenggelamkan?
5. Bagaimalkna ketentuan pemusnahan bmd dengan ketentuan perundang undangan?

E. SEBAB LAIN-LAIN

3. Bagaimana prosedur penghapusan karena barang milik daerah tersebut hilang?
4. Bagaimana prosedur penghapusan karena barang milik daerah tersebut kecurian?
5. Bagaimana prosedur apabila bmd itu terbakar ataupun susut?
6. Bagaimana prosedur apabila bmd itu menguap?
7. Bagaimana prosedur apabila bmd itu mencair?
8. Bagaimana prosedur apanila bmd itu kadaluarsa mati dan sebagai akibat dari kahar (force majeure)?

DOKUMENTASI

Dokumentasi setelah Wawancara dengan pejabat dan staf Penghapusan

Barang Milik Daerah Provinsi Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

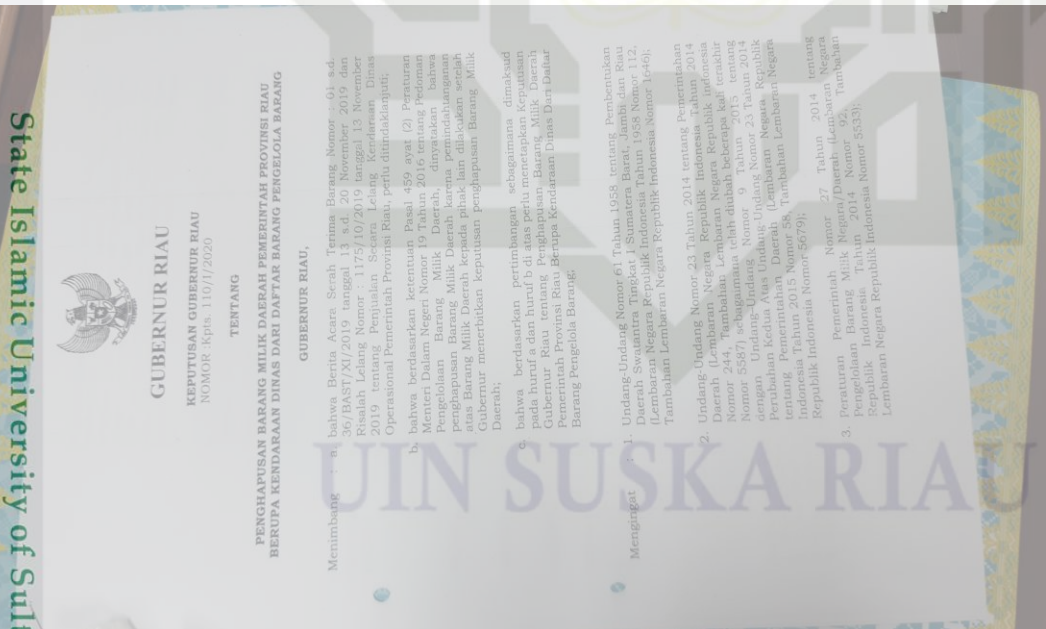
© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

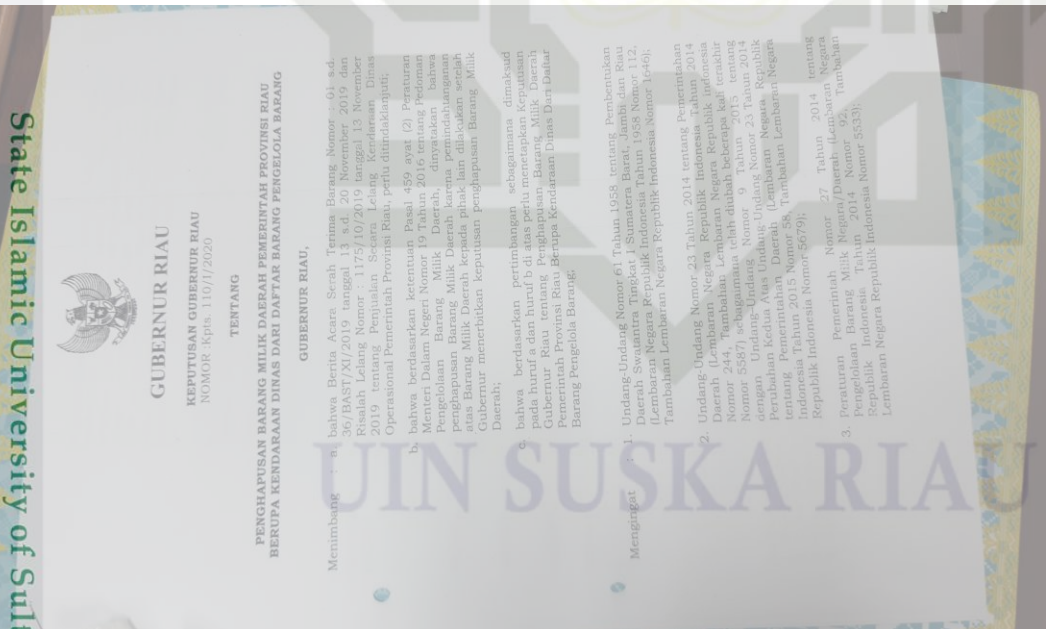
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

[illegible]

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 110/I/2020
TANGGAL : 14 Januari 2020

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI RIAU DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BERUPA KENDARAAN DINAS DARI DAFTAR BARANG PENGELOLA BARANG

No	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Jumlah	Harga Satuan	Total Nilai Perolehan	Nilai Penyusutan	Nilai Buku	Spesifikasi/Lokasi	Kondisi	Kes
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			Station Wagon/TOYOTA (RINA) 15 G M/T/BM 1289 TP	2005	1	191.400.000	191.400.000,00		35.427.000	Kota Pekanbaru	Rusak	
2			Station Wagon/NISSAN LIVINA/BM 1206 TP	2008	1	161.534.546	161.534.545,70		24.157.000	Kota Pekanbaru	Rusak	
3			Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)/FORD EVEREST / MINI BUS/BM 1591 T	2005	1	218.985.000	218.985.000,00		51.695.000	Kota Pekanbaru	Rusak	
4			Pick-Up / MB /Mitsubishi L200/BM 8700 AP	2005	1				10.235.000	Kota Pekanbaru	Rusak	
5			Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)/NISSAN/GRAND LIVINA XV M/T/BM 1121 TP	2007	1	159.105.743	159.105.743,00		27.228.100	Kota Pekanbaru	Rusak	
6			Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)/Opel Blazer DO (PEL)/HC 01/BM 1981 AP	2001	1	204.337.780	204.337.780,00		10.704.000	Kota Pekanbaru	Rusak	
7			Station Wagon/Toyota/Avanza/BM 1300 TP	2005	1	174.900.000	174.900.000,00		35.427.000	Kota Pekanbaru	Rusak	
8			Station Wagon/Toyota Kijang LSX/BM 1636 AP	2004	1	80.000.000	80.000.000,00		24.804.000	Kota Pekanbaru	Rusak	
9			Pick Up/Toyota/BM 8716 AP	2006	1	70.574.070	70.574.070,00		7.659.000	Kota Pekanbaru	Rusak	
10			Micro Bus (Penumpang 15 -30 orang) / Mitsubishi Colt PE 398/BM 7230 AP	2001	1	100.238.174	100.238.174,00		22.179.000	Kota Pekanbaru	Rusak	



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7081/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 19 November 2019 M
22 Rabiul Awwal 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ricky Prayoga
NIM. : 11675102890
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau" Untuk itu kami mohon
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H. R. Soebrandt No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/102/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 8 Januari 2020 M
12 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Ricky Prayoga
NIM. : 11675102890
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau" Untuk itu kami mohon
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh/Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/28054
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7018/2019 Tanggal 19 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: RICKY PRAYOGA
2. NIM / KTP	: 11675102890
3. Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: INDRAGIRI HILIR
6. Judul Penelitian	: ANALISIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA KANTOR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU
7. Lokasi Penelitian	: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU


Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sepenuhnya.

Dibuat di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 21 November 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON (ZIN-RISET/31164
 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII.PP.00.9/102/2020 Tanggal 8 Januari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

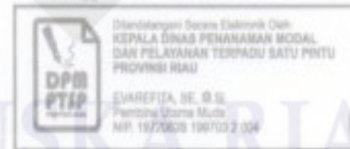
- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : RICKY PRAYOGA |
| 2. NIM / KTP | : 11675102890 |
| 3. Program Studi | : ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Februari 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Cut Nyak Dien II/2 Telp./Fax. (0761) 33266
PEKANBARU

Kode Pos : 28126

SURAT KETERANGAN Nomor : 800/BPKAD-SEKR/ 394 . 3

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : LUZI SANTINOZA, SE
NIP : 19790420 201001 2 012
Pangkat/gol : Penata (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum BPKAD Provinsi Riau

Bersama dengan surat ini menyatakan bahwa :

Nama : RICKY PRAYOGA
NIM : 11675100174
Prodi : Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (Satu)
Alamat : Pekanbaru
Judul : Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau
Lokasi : Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau

Bahwa benar yang bersangkutan telah melaksanakan riset di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Pekanbaru, 06 April 2020

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU,
SEKRETARIS,
Ub.
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN
UMUM,



LUZI SANTINOZA, SE
Penata (III/c)
NIP. 19790420 2041001 2 012

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ricky Prayoga, Dilahirkan di kuala laheng pada tanggal 18 Februari 1998. Anak dari Bapak Amir (Alm) dan Ibu Rasunah, S.Pd Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Selama hidup penulis telah menyelesaikan beberapa pendidikan. Pendidikan SD pada SD Negeri 009 Kuala Lahang dan lulus tahun 2010, melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 1 Gaung lulus pada tahun 2013, lalu melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 1 Gaung dan lulus pada tahun 2016. Setelah menempuh pendidikan selama 12 tahun, pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ke UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Program Studi Adminitrasi Negara S-1. Pada tahun 2019 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau (BPKAD). Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Langkat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Penulis mengikuti ujian munaqasah pada tanggal 7 November 2020 dengan judul skripsi ***“Analisis Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Oleh Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau”*** dan dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos)